



WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kabupaten dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03 ;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan Arus Kas merupakan Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
7. Neraca Pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi.
9. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan Realisasi Anggaran
- b. neraca
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 662.197.444.473,99	
b. belanja	Rp 643.560.132.766,70	
Surplus		Rp 18.637.311.707,29
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp 112.836.931.813,42	
- pengeluaran	Rp 7.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp 105.836.931.813,42 +
SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)		Rp 124.474.243.520,71

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp(4.198.608.259,99)** dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 657.998.836. 219,00
b. realisasi	Rp 662.197.444.473,99 _
Selisih lebih / (kurang)	Rp (4.198.608.259,99)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp 120.275.635.265,72** dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 763.835.768.032,42
b. realisasi	Rp 643.560.132.766,70_
Selisih lebih / (kurang)	Rp 120.275.635.265,72

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /defisit sejumlah **Rp (124.474.243.520,71)** dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp (105.836.931.813,42)
b. realisasi	Rp 18.637.311.707,29 _
Selisih lebih / (kurang)	Rp (124.474.243.520,71)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp 00,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 112.836.931.813,42
b. realisasi	Rp 112.836.931.813,42_
Selisih lebih / (kurang)	Rp 00,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp 00,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 7.000.000.000,00
b. realisasi	Rp 7.000.000.000,00_
Selisih lebih / (kurang)	Rp 00,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp 00,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto	Rp 105.836.931.813,42
b. realisasi pembiayaan netto	Rp 105.836.931.813,42_
Selisih lebih / (kurang)	Rp 00,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. jumlah Aset	Rp 1.939.454.811.083,69
b. jumlah Kewajiban	Rp 3.534.889.310,66
c. jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.935.919.921.773,03

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. saldo Kas Awal per 01 Januari Tahun 2013	Rp 110.871.594.770,54
b. arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 180.277.780.337,08

c	arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(00,00)
d	arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	(12.011.471,94)
f	Saldo Kas Akhir di BUD	Rp	(123.487.386.119,80)
g	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	14.706.038,00
h	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2012	Rp	123.502.092.157,80

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi , program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; dan
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



NAFIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.4/2014)